

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

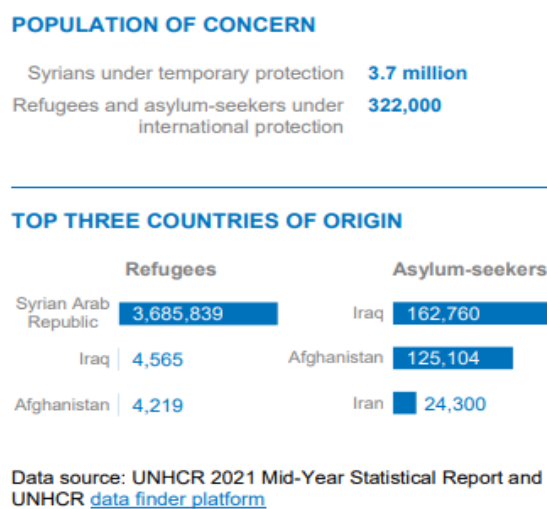
Kebijakan *Open Door Policy* Turki terhadap pengungsi telah menjadi aspek penting dalam kebijakan luar negeri Turki dalam beberapa tahun terakhir yang didasari oleh faktor kemanusiaan. Semenjak pecahnya perang yang disebabkan oleh *Arab Spring* di Suriah pada 2011, Turki telah menerapkan kebijakan *Open Door Policy* guna memberi bantuan kemanusiaan pada pencari suaka yang melarikan diri dari konflik. *Arab spring* tidak hanya menyebabkan gejolak internal dan konflik regional, namun turut menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang meninggalkan negaranya dan mencari suaka ke negara lain (Sayın, 2016). Kelompok pengungsi Suriah pertama datang ke Turki pada April 2011, beberapa minggu setelah tanggapan presiden Suriah Bashar Al-Assad terhadap demonstrasi anti-rezim di Suriah yang berubah menjadi kekerasan. Pada saat itu, warga Suriah dapat pergi ke Turki tanpa visa. Turki mengumumkan akan menerapkan kebijakan *Open Door Policy* bagi para pengungsi. Pada bulan Oktober 2011, pemerintah Turki mengumumkan bahwa pengungsi akan berstatus “perlindungan sementara” (Makovsky, 2019).

Pada awal masuknya gelombang pengungsi Suriah ke Turki, jumlah pengungsi yang memasuki Turki relatif sedikit. Pada awal Juli 2011,

sebanyak 15.000 warga Suriah telah bermukim di tenda yang didirikan di Provinsi Hatay, Turki. Gejala awal melonjaknya peningkatan jumlah pencari suaka dimulai pada tahun 2012, gagalnya upaya gencatan senjata dan meningkatnya pertempuran menyebabkan gelombang besar kedatangan pengungsi selama hampir empat tahun berlanjut (Icduygu, 2015). Pada Agustus 2012, Turki menyatakan hanya dapat menampung kurang lebih 100.000 warga Suriah. Namun, pada bulan Oktober, jumlah pengungsi yang ada telah melebihi kapasitas awal (Hurriyet Daily News, 2012). Hal tersebut menyiratkan bahwa ketika jumlah yang ditetapkan telah tercapai, maka akan ada pembatasan terhadap jumlah masuknya pengungsi Suriah (Batalla & Tolay, 2018).

Pada Agustus 2019, terdapat 3,6 juta pengungsi Suriah terdaftar yang tinggal di Turki, dan hampir 400.000 pengungsi dari negara lain, termasuk Afghanistan, Irak, dan Iran (Leghtas, 2019). Berdasarkan data *Mixed Migration Center*, jumlah migran gelap asal Afghanistan yang tiba di Turki telah meningkat sejak 2018, sekitar 100.000 migran gelap. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya gelombang oposisi di Turki (Foschini, 2022). Turki yang hingga saat ini menjadi negara dengan jumlah pengungsi terbanyak di dunia memberi tanggapan berupa diperketatnya pengamanan perbatasannya dengan Iran dan pemberlakuan deportasi massal ke Kabul (Pitonak, 2018). Wilayah penyebrangan yang sering dilalui para migran Afghanistan adalah provinsi Iğdır, Ağrı, Van dan Hakkari. Di provinsi-provinsi itulah kerap kali para migran bertemu dengan penyelundup yang

akan mengantarkan mereka masuk ke Turki. Penyelundup seringkali menyelundupkan migran, rokok bahkan narkotika (Pitonak, 2018).



Gambar 1.1 Total Populasi Pencari Suaka di Turki

Sumber: UNHCR, 2021

Setelah serangan bom di Reyhanlı pada tahun 2013, para demonstran mengecam para radikal yang seakan-akan dapat melintasi perbatasan sesuka hati (Burch, 2013). Pada 13 Maret 2016, terjadi serangan bom bunuh diri oleh militant kurdi di Ankara. Pada 29 Juni 2016, terjadi serangan bom di bandara Atatürk yang menewaskan 41 orang dengan dugaan pelaku adalah anggota ISIS. Pada 20 Agustus 2016, terjadi serangan bom di Gaziantep dan menewaskan 30 orang, pelaku diduga adalah anggota ISIS (BBC News, 2016). Pada Januari 2016, seorang pengungsi Suriah berafiliasi dengan ISIS melucurkan bom bunuh diri di Blue Mosque Istanbul dan menewaskan 10 wisatawan dan melukai beberapa lainnya. Setelah rangkaian peristiwa tersebut, Turki mulai menegaskan tindakan dengan memperketat kontrol

perbatasan dengan syarat masuk diwajibkan melalui pos perbatasan resmi (Makovsky, 2019). Dengan hadirnya pencari suaka di Turki dapat dipastikan akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat asli Turki, terutama dalam hal aspek sosial budaya dan aspek ekonomi.

Selain tembok perbatasan dengan Suriah, Turki telah mendirikan konstruksi serupa di beberapa bagian perbatasannya dengan Iran dan di sepanjang perbatasan dengan Irak pada Mei 2017 (Olejárová, 2018). Pada Juli 2021, Presiden Erdoğan mengumumkan bahwa Turki akan melanjutkan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan dengan Iran (Arab News, 2021). Perbatasan pertama telah dibangun di bagian timur laut perbatasan di provinsi Iğdır and Ağrı. Perkembangan tersebut menggambarkan perubahan signifikan dari kebijakan perbatasan Turki dan menandai perubahan makna dan fungsi perbatasan. Jadi sementara pemerintah Turki mengklaim kebijakan “*Open Door Policy*” masih berlanjut, namun nyatanya kebijakan *Open Door Policy* telah beralih ke *Border Wall Project*.



Gambar 1.2 Peta *Border Wall Project* Turki  
Sumber: (Robinson, 2017)

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa alasan Turki menerapkan kebijakan *Border Wall Project*. Peneliti tertarik untuk menganalisa *Border Wall Project* Turki karena negara Turki merupakan negara yang pada 2011 membuka perbatasannya dengan penerapan kebijakan *Open Door Policy* namun pada 2016, Pemerintah Turki memulai pembangunan tembok di sepanjang perbatasan untuk mengendalikan pergerakan antar negara. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan rujukan dalam penelitian terdahulu guna memahami lebih dalam fenomena atau isu yang dipilih. Rujukan pertama adalah artikel dalam jurnal *The Journal of Middle East and Central Asian Studies* oleh Ahmet Faruk Isik berjudul “*Transforming Turkish Foreign Policy*” (Isik, 2021). Penelitian tersebut menjelaskan pengaruh kebijakan Turki Modern terhadap permasalahan domestik dan perubahan arah politik pada politik Turki masa lalu hingga politik Turki saat ini. Rujukan kedua merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Zerrin Arslan , Şule Can & Thomas M. Wilson dengan judul “*Do border walls work?: security, insecurity and everyday economy in the Turkish-Syrian borderlands*” (Arslan et al., 2021). Penelitian ini berisi efektivitas tembok perbatasan Turki-Suriah di Hatay, dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar, pengungsi, dan penyelundupan migran. Artikel ini mengkaji dampak sosial-ekonomi tembok tersebut terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

Rujukan ketiga merupakan artikel jurnal oleh Barbora Olejárová dengan judul “*The Great Wall of Turkey: From “The Open-Door Policy” to*

*Building Fortress?*” (Olejárová, 2018). Penelitian ini menganalisis perkembangan perbatasan Turki dengan Suriah dan mengungkap beberapa alasan penerapan *Border Wall Project* dari sisi keamanan dan integritas wilayah. Rujukan keempat yakni artikel jurnal yang ditulis oleh Kerem Özbey dengan judul “*Açık Kapı Politikasından Sınır Duvarı Projesine: Türkiye’nin Sınır Politikasının Dönüşümü*” (Özbey, 2022). Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif mengenai penjelasan transformasi kebijakan perbatasan Turki dari masa lalu hingga 2022 dan berisi penjabaran terkait kekhawatiran Turki akan banyaknya migrasi ilegal, kejahatan dan penyelundupan di perbatasan selatan dan Timur Turki.

Dalam penelitian yang berjudul “Perubahan Kebijakan Turki: *Open Door Policy* Menjadi *Border Wall Project* Tahun 2015-2022” ini, penulis menerapkan pendekatan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Meski terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengidentifikasi faktor-faktor perubahan kebijakan Turki dalam *Border Wall Project*, penulis menerapkan pendekatan yang berbeda dalam hal penggunaan teori dengan menganalisis temuan-temuan dari jurnal yang telah dipaparkan diatas, dan penulis mengidentifikasi bahwa faktor yang ada dalam penelitian-penelitian tersebut saling berkaitan. Dengan menjadikan faktor-faktor yang ada dari berbagai penelitian menjadi satu kesatuan, penulis berharap agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam berdasarkan teori perubahan kebijakan luar negeri (*foreign policy change*) oleh Joakim Eidenfalk.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni **“Mengapa Turki menerapkan perubahan kebijakan dari *Open Door Policy* menjadi *Border Wall Project* pada tahun 2015-2022?”**.

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Secara Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah dimaksudkan agar dapat bermanfaat sebagai suatu sumbangsih ilmu pengetahuan bagi pembaca, khalayak umum maupun akademisi dalam bentuk penelitian ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan gelar Strata-1 atau Sarjana Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

### 1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor perubahan kebijakan Turki yang pada awalnya menerapkan *Open Door Policy* kemudian mulai menerapkan *Border Wall Project* pada tahun 2015. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kebijakan Turki terkait penerapan *Border Wall Project* pada periode tahun 2015-2022. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembaca sebagai alternatif referensi di masa yang akan datang.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri**

Agar penulisan terarah, penulis memilih teori *foreign policy change* (Perubahan Politik Luar Negeri) yang dikemukakan oleh Joakim Eidenfalk. Teori merupakan satu proposisi yang menyatakan secara logis hubungan antara dua atau lebih konsep atau variabel yang bertujuan menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara fenomena tertentu (Silalahi, 2009). Dalam teori *foreign policy change* oleh Joakim Eidenfalk menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. Menurut Joakim Eidenfalk, perubahan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor domestik dan faktor internasional. Fokus dibagi rata pada masing-masing faktor, meski tergantung pada studi kasus, tidak jarang salah satu faktor dapat lebih berpengaruh dibandingkan faktor lainnya (Eidenfalk, 2009).

Robert D. Putnam berpendapat bahwa politik domestik dan internasional saling berkaitan dengan sebutan "*The Two Level Games*" yang mengacu pada bagaimana politik domestik seringkali memberikan pengaruh terhadap politik internasional dan sebaliknya (Eidenfalk, 2009). Oleh sebab itu, pada pembuatan kebijakan luar negeri, suatu negara perlu mempertimbangkan aspek politik domestik maupun internasional secara



komprehensif. Tindakan dan perilaku suatu negara adalah tindakan dan perilaku yang diambil aktor yang mengatasnamakan negara. Maka dari itu, negara merupakan para pembuat keputusan itu sendiri. Cara para pembuat keputusan mengidentifikasi situasi adalah salah satu cara mereka untuk menjelaskan orientasi tindakan dan sebab hal itu dilakukan (Coplin, 1992). Dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri adalah suatu kegiatan yang berbentuk pertahanan dan melindungi kepentingan negara. Ini mencakup berbagai hal seperti kondisi politik domestik suatu negara, stabilitas keamanan, kelompok kepentingan dan masih banyak lagi aspek lainnya yang kemudian terhubung dengan pembuatan kebijakan.

Menurut Joakim Eidenfalk, faktor dalam negeri memainkan peranan penting dalam mempengaruhi dan menekan pemerintah agar melakukan perubahan kebijakan luar negeri. Pengambil keputusan penting untuk memperhitungkan faktor domestik saat memutuskan kebijakan luar negeri, karena mereka mengandalkan dukungan pihak dalam negeri agar tetap berkuasa (Eidenfalk, 2009). Situasi politik domestik yang ada dapat memberikan dorongan terhadap kebijakan yang nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri. Opini publik dan media memberi dampak yang cukup besar terhadap kebijakan yang diambil pemerintah jika diantaranya terdapat perbedaan pendapat yang cukup kuat. Menurut Gustavsson, dukungan dari partai politik lain dan aktor lain di masyarakat juga penting untuk menegakkan kebijakan luar negeri tertentu (Eidenfalk, 2009).

Dengan berfokus pada teori perubahan kebijakan luar negeri oleh Joakim Eidenfalk, diharapkan dapat menjelaskan faktor perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam teori yang digagas oleh Joakim Eidenfalk, para pembuat keputusan suatu negara pasti sudah mempertimbangkan unsur politik domestik serta internasional dalam pembuatan kebijakannya. Hal tersebut memberi gambaran bahwa kebijakan yang diputuskan suatu negara bukan hanya berdasarkan keinginan individu pembuat keputusan semata. Akan tetapi, pembuat keputusan kebijakan juga turut memegang peran yang sangat berpengaruh dalam kewenangannya terhadap penyetujuan dan pengaplikasian kebijakan luar negeri. Menurut Joakim Eidenfalk, Para pengambil keputusan dapat mengabaikan satu atau bahkan beberapa faktor, namun apabila faktor-faktor tersebut saling berinteraksi maka tekanan pada pengambil keputusan kebijakan suatu negara akan menjadi sangat besar dan pada akhirnya, perubahan kebijakan dianggap sebagai sebuah hal yang perlu dilakukan. (Eidenfalk, 2009). Beberapa faktor perubahan kebijakan luar negeri menurut Joakim Eidenfalk antara lain :

#### **1.4.1.1 Faktor Domestik**

Faktor perubahan kebijakan luar negeri terbagi menjadi faktor domestik dan internasional. Faktor perubahan dalam negeri diidentifikasi melalui Birokrasi, Opini Publik, Media, Kelompok Kepentingan dan Partai Politik. Opini publik dan media dapat berdampak cukup besar terhadap kebijakan luar negeri suatu negara apabila terdapat pro kontra yang cukup

kuat diantaranya. Selain itu, partai politik, kelompok kepentingan dan aktor-aktor lain juga perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan luar negeri.

#### **1.4.1.1.1 Birokrasi**

Menurut William D. Coplin, birokrasi yang mempengaruhi merujuk pada berbagai individu serta organisasi dalam lembaga pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun, serta melaksanakan kebijakan (Coplin, 1992). Namun, seperti yang dikatakan oleh Charless F. Hermann, apabila suatu kelompok birokrasi tertentu mempunyai posisi dimana mereka dapat didengar oleh menteri atau pejabat tinggi lainnya, maka mereka dapat dikatakan efektif dalam mendukung perubahan kebijakan (Eidenfalk, 2009). Dikutip oleh Joakim Eidenfalk, seperti yang dinyatakan oleh Hermann dalam modelnya, jika kelompok tertentu dalam birokrasi mempunyai posisi di mana mereka dapat didengar oleh menteri, atau pejabat tinggi lainnya, mereka bisa efektif dalam mendukung perubahan kebijakan (Eidenfalk, 2009). Namun, kajian Kalevi J. Holsti terkait perubahan kebijakan luar negeri meneliti delapan studi kasus dan didapatkan hasil bahwa hanya dalam satu studi kasus, birokrasi berperan penting dalam perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2009).

#### **1.4.1.1.2 Opini Publik**

Opini publik merupakan salah satu faktor perubahan kebijakan luar negeri yang sangat penting karena pemerintah memerlukan dukungan dari pemilih atau masyarakatnya untuk menjalankan kebijakannya dan menjaga image baik selama pemilu. Apabila masyarakat tidak puas dengan kebijakan tertentu yang ditetapkan pemerintah, suara yang masyarakat miliki biasanya akan diungkapkan melalui demonstrasi. Oleh sebab itu, opini masyarakat dapat memberi tekanan dan dorongan terhadap perubahan kebijakan luar negeri. Dalam menetapkan kebijakan luar negeri, pemerintah perlu mempertimbangkan opini masyarakat dan memastikan bahwa pihak oposisi tidak bebas atau dengan kata lain, dibatasi semaksimal mungkin. Opini publik juga berperan penting dalam meningkatkan dukungan bagi kelompok kepentingan dan aktor masyarakat sipil dalam mempengaruhi keputusan kebijakan suatu negara.

#### **1.4.1.1.3 Media**

Di era abad ke 21, media merupakan salah satu bagian dari majunya teknologi dan informasi. Banyak argumen yang menyatakan bahwa media dikontrol atau diarahkan oleh pemerintah sehingga menjadi pendukung kebijakan pemerintah. Dikatakan bahwa melalui kontrol informasi ini mereka membantu pemerintah untuk menjaga opini publik tetap berpihak pada pemerintah dan mendukung kebijakan luar negerinya (Eidenfalk, 2009). Namun, seperti yang dinyatakan oleh Abbas Malek dan Krista E. Wiegand, beberapa penelitian telah dilakukan untuk

menunjukkan pengaruh media terhadap kebijakan luar negeri. Media sebagai suatu alat penghubung antara masyarakat dan pemerintah menjadikannya perlu dipertimbangkan oleh pembuatan kebijakan bila ingin berhasil menerapkan kebijakannya (Eidenfalk, 2009).

Media memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan, seperti membentuk opini publik dan menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, media juga dapat berperan sebagai penyelidik yang memberikan informasi baru kepada pemerintah atau masyarakat yang dapat mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. Disisi lain, media juga berperan sebagai forum bagi berbagai untuk memberi dorongan terhadap suatu kebijakan tertentu (Eidenfalk, 2009). Oleh sebab itu, media memberikan pengaruh penting dalam isu kebijakan dalam pemberian dukungan atau penolakan terhadap kebijakan tertentu, hal tersebut dapat memberi tekanan tambahan pada pemerintah dalam mengambil keputusan. Media dapat mempengaruhi opini publik yang mana juga dapat menambah tekanan pada pemerintah sebagai penetap kebijakan.

#### **1.4.1.1.4 Kelompok Kepentingan**

Pendefinisian kelompok kepentingan menurut Joakim Eidenfalk difokuskan dengan mengikuti pandangan dari Robert H. Salisbury, sebagaimana dikutip oleh John W. Dietrich sebagai sebuah asosiasi terorganisir yang terlibat dalam aktivitas yang berhubungan keputusan kebijakan pemerintah. Dietrich melanjutkan: “hal ini mencakup

kelompok-kelompok yang dibentuk oleh warga negara atau masyarakat yang terorganisir berdasarkan isu tertentu, serta lobi-lobi profesional, bisnis, dan firma hukum kepentingan publik (Eidenfalk, 2009). Kelompok kepentingan umumnya berfokus pada isu tertentu yang dapat menarik masyarakat, yang pada akhirnya para pengambil keputusan menanggapi hal itu dengan serius dikarenakan hal tersebut kemungkinan besar dapat menurunkan image baiknya di mata masyarakat. Ditambah dengan semakin maraknya globalisasi yang dapat meningkatkan pengaruh kelompok-kelompok kepentingan secara cepat serta dihubungkan melalui para aktivis di seluruh dunia dan kadang didukung oleh media (Dietrich, 1999).

#### **1.4.1.1.5 Partai Politik**

Kategori partai politik dalam hal ini mengacu pada partai politik di parlemen, terutama partai politik yang memerlukan dukungan pemerintah untuk memerintah atau untuk melanjutkan/mengubah kebijakan tertentu. Partai-partai oposisi juga termasuk dalam kategori partai politik sebagai faktor yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, dalam hal ini memobilisasi opini publik terhadap isu-isu tertentu. Apabila pihak oposisi cukup vocal dan mempunyai pengaruh yang cukup, maka hal tersebut dapat memberikan tekanan terhadap pemerintah untuk mengubah kebijakan. Partai-partai oposisi juga termasuk dalam kategori ini sebagai faktor yang berpengaruh dalam membentuk kebijakan, dalam hal memobilisasi opini publik mengenai isu-isu yang bermuatan tertentu.

Juliet Kaarbo berpandangan bahwa jika pihak oposisi mempunyai pengaruh yang cukup dan/atau cukup vokal, maka hal ini dapat memberikan tekanan yang signifikan terhadap pemerintah untuk mengubah kebijakan (Eidenfalk, 2009). Jika publik menyatakan penolakan terhadap suatu kebijakan luar negeri, kemungkinan besar pemerintah harus melakukan negosiasi atau penyesuaian agar kebijakan dapat disetujui parlemen. Selain itu, tekanan yang diciptakan oleh publik atau warga negara ataupun media pun dapat menimbulkan tekanan terhadap anggota parlemen. Interaksi yang terjadi antar partai politik satu dan lainnya, dan juga aktor domestik seperti opini publik, media dan kelompok kepentingan dapat menimbulkan tekanan untuk dilakukannya perubahan kebijakan.

#### **1.4.1.2 Faktor Internasional**

Politik internasional merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari negara, institusi, dan aktor negara, yang semuanya berinteraksi satu sama lain pada tingkatan yang berbeda. Selain aktor, faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika mempelajari pengaruh faktor internasional adalah kekuasaan, norma dan institusi. Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye berpendapat bahwa meski suatu negara seringkali menjadi aktor utama, aktor-aktor lain juga mempunyai peranan yang sangat penting di era saat ini (Eidenfalk, 2009). Dalam hal ini, institusi dan aktor non-negara juga memainkan peran utama dan turut memberikan pengaruh yang signifikan pada negara, dan menyediakan berbagai channel atau saluran yang dapat

digunakan oleh berbagai aktor untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, aktor non-negara yang dimaksud seperti jaringan teroris dan organisasi non-pemerintah. Faktor internasional pendorong perubahan politik luar negeri terbagi kedalam empat kategori yakni faktor global, faktor regional, hubungan bilateral, dan aktor non-negara.

#### **1.4.1.2.1 Faktor Global**

Faktor global berfokus pada perubahan sistem politik internasional yang memberi dampak pada global dan juga berdampak pada penetapan kebijakan luar negeri satu negara. Suatu peristiwa atau aktor dapat memberikan pengaruh pada perubahan kebijakan luar negeri. Mark T. Berger dan Douglas A. Borer menjelaskan bahwa peristiwa yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan negara adalah serangan 11 September. Serangan 11 September menyebabkan Amerika Serikat menetapkan "*War On Terror*", hal tersebut telah mempengaruhi negara-negara didunia hingga saat ini (Eidenfalk, 2009).

#### **1.4.1.2.2 Faktor Regional**

Aktor-aktor regional, seperti lembaga-lembaga regional yang terdiri dari negara-negara, mungkin mempunyai dampak besar terhadap pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Selain itu, norma-norma yang ada di beberapa wilayah mungkin juga harus dipertimbangkan bila pemerintah suatu negara hendak menerapkan kebijakan luar negerinya. Wilayah maupun negara yang berbeda dapat



mempunyai standar norma yang berbeda, yang berasal dari nilai-nilai budaya, sejarah dan adat tradisi. Disisi lain, seimbangnya kekuatan regional suatu kawasan juga turut andil dalam penerapan kebijakan suatu negara. Kekuasaan dan kapabilitas aktor-aktor regional merupakan bagian yang tidak luput dari pertimbangan kebijakan luar negeri suatu negara.

#### **1.4.1.2.3 Hubungan Bilateral**

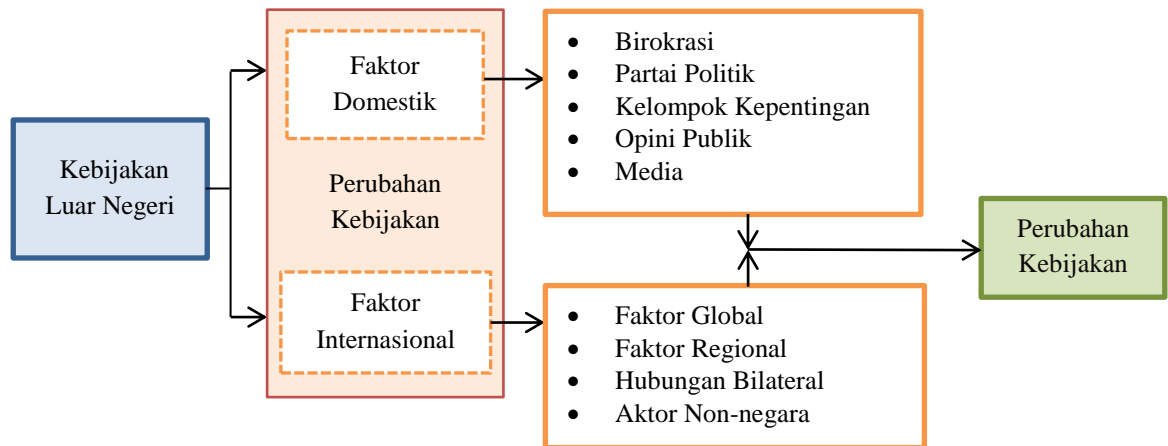
Dalam kategori ini, hubungan yang diperhitungkan adalah antara pemerintah dengan aktor lain, institusi atau organisasi global atau regional. Kategori ini hanya akan terpengaruh bila terdapat pengaruh antara negara dan aktor-aktor seperti negara dan institusi internasional lainnya. Negara dan institusi internasional dapat memberikan pengaruhnya terhadap negara lain melalui aliansi, perdagangan ataupun ancaman militer dan ekonomi. Pengaruh yang diberikan bertujuan untuk menekan dan memberikan dorongan pada suatu negara tujuan agar mengadopsi kebijakan luar negeri yang telah disesuaikan ataupun berbeda. Pada tingkatan ancaman yang berbeda, maka tekanan dan dampak yang dihasilkan akan berbeda, namun akan tetap berdampak.

#### **1.4.1.2.4 Aktor Non-negara**

Aktor transnasional yang dimaksud dalam kategori ini adalah aktor transnasional berupa jaringan teroris, jaringan kriminal, korporasi, organisasi hak asasi manusia, dan lain-lain. Meski suatu negara

merupakan aktor utama dalam politik internasional, peran aktor non-negara tidak dapat diabaikan dalam perubahan kebijakan luar negeri, karena aktor-aktor non-negara biasanya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terkait isu-isu tertentu. Tidak jarang interaksi antar faktor-faktor baik faktor domestik maupun internasional dapat memberikan tekanan atau pengaruh yang cukup signifikan bagi para pengambil kebijakan suatu negara untuk merubah kebijakan negara. Berdasarkan pandangan Holsti, ancaman militer dapat digolongkan sebagai faktor internasional, tergantung dari mana asal ancaman tersebut (Eidenfalk, 2009). Militer sebagai faktor domestik dapat dimasukkan dalam kategori kelompok kepentingan, sedangkan gerakan etnis dapat dimasukkan ke dalam aktor non-negara atau kelompok kepentingan, bahkan mungkin partai politik, tergantung pada konteksnya dan dengan demikian dapat dikategorikan dalam salah satu kategori ini tergantung pada kasus tertentu (Eidenfalk, 2009).

## 1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.3 Peta Konsep Sintesa Pemikiran  
Sumber: Penulis

Peta konsep diatas merupakan gambaran garis pokok dari penelitian ini. Kebijakan luar negeri Turki dalam hal ini *Open Door Policy* mengalami perubahan menjadi *Border Wall Project* atau pembangunan tembok di perbatasan Turki. Perubahan tersebut bila didasarkan pada teori perubahan kebijakan luar negeri oleh Joakim Eidenfalk disebabkan oleh adanya faktor domestik dan faktor internasional. Faktor domestik dapat terdiri dari birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan, opini publik dan media. Selain itu, terdapat juga faktor internasional yang juga dapat mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri yakni faktor global, faktor regional, hubungan bilateral, dan aktor non-negara. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak jarang pengambil keputusan bisa mengabaikan satu atau lebih faktor saat pengambilan keputusan. Akan tetapi, ketika faktor-faktor ini saling berinteraksi, tekanan yang dihadapi pengambil keputusan

akan meningkat secara signifikan dan mendorong perlunya dilakukan perubahan kebijakan.

## 1.6 Argumen Utama

Perubahan kebijakan *Open Door Policy Turki* menjadi *Border Wall Project* merupakan salah satu bentuk perubahan kebijakan luar negeri yang diterapkan Turki. Berdasar pada latar belakang yang telah dipaparkan serta sintesa dari teori dan konsep yang penulis terapkan, perubahan kebijakan *Open Door Policy* menjadi *Border Wall Project* oleh Turki dipengaruhi oleh dua kategori faktor. Pembangunan tembok perbatasan Turki dengan Suriah, Iran dan Irak dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan mencegah masuknya penyelundupan dan pengungsi ilegal serta meningkatnya gelombang oposisi dan berubahnya arah opini publik Turki. Selain itu, pembangunan tembok perbatasan Turki juga dipengaruhi oleh faktor internasional, khususnya dipengaruhi oleh aktor non-negara seperti meningkatnya ancaman terorisme dari kelompok PKK dan ISIS. Keterkaitan yang terjadi antara faktor domestik dan internasional dalam *Border Wall Project* tersebut menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak dapat dipisahkan dari pengaruh faktor domestik dan faktor internasional. Dengan timbulnya kedua faktor tersebut menyebabkan tekanan yang dihadapi pengambil keputusan meningkat secara signifikan dan mendorong perlunya dilakukan perubahan kebijakan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penelitian kualitatif eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel atau gejala (Silalahi, 2009). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian. Penelitian kualitatif bercirikan dengan pengumpulan data yang berbentuk bukan angka. Yang mana dimaksudkan untuk menjawab pada titik pertanyaan dasar “mengapa?”. Penulis akan menerapkan tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif ditujukan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Melalui penelitian eksplanatif, dapat diketahui bagaimana korelasi antara dua atau lebih variabel baik pola, arah, sifat, bentuk, maupun kekuatan hubungannya (Silalahi, 2009). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penjelasan *Causal Explanations*, yang merupakan penjelasan tentang apa penyebab dari suatu peristiwa atau fenomena. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus dalam menjelaskan mengenai pengaruh politik domestik Turki terhadap perubahan kebijakan *Open Door Policy* dan penerapan *Border Wall Project* di perbatasan Turki.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Guna membatasi penelitian agar selaras dengan latar belakang topik yang telah dipaparkan, pembahasan dan penjelasan dalam penelitian ini difokuskan pada periode tahun 2015 hingga 2022. Pada rentang waktu tersebut merupakan awal diterapkannya *Border Wall Project* oleh Turki

pada beberapa wilayah perbatasan, pembangunan *Border Wall Project* masih berlanjut hingga saat ini. Dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada faktor domestik berupa partai politik, opini publik dan media serta faktor internasional aktor non-negara dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. Pembatasan analisis dilakukan dengan tujuan guna mendapat pemahaman yang lebih spesifik dan mendalam mengenai dinamika faktor-faktor tersebut dalam perubahan kebijakan luar negeri.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber lain yang telah tersedia. Sumber data sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan materi original (Silalahi, 2009). Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan dengan mengumpulkan data data dan informasi yang berasal dari buku, artikel jurnal dan situs internet. Dilakukannya pengumpulan data pada era globalisasi ini memegang peranan penting dalam kemudahan yang didapat penulis, salah satunya terkait kemudahan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian beberapa telah tersedia online dan mudah untuk diakses.

#### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan pendekatan kualitatif dikarenakan data penelitian yang akan digunakan bersifat pengumpulan data yang berbentuk kata-kata dan bukan rangkaian angka yang didapat dari sumber sekunder berupa kalimat tertulis maupun yang terucap dari para aktor. Teknik analisis data yang diterapkan sejalan dengan metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yakni kualitatif eksplanatif, hal tersebut sejalan dengan tujuan penelitian eksplanatif yang ditujukan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa (Silalahi, 2009).

#### 1.7.5 Sistematika Penulisan

Penyajian pada penelitian ini disajikan sesuai pembagian bab sebagai berikut :

**BAB 1**, penulis akan menuliskan aturan wajib dalam penulisan yakni pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang didasarkan pada teori perubahan kebijakan luar negeri oleh Joakim Eidenfalk, argumentasi utama dan sistematika penulisan juga akan ditulis dalam bagian ini.

**BAB 2**, dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai faktor diterapkannya Border Wall Project oleh Turki khususnya faktor yang dipengaruhi oleh faktor domestik. Pemaparan difokuskan berdasar pada teori perubahan kebijakan luar negeri oleh Joakim Eidenfalk, dalam

konteks negara Turki. Kepentingan dalam membahas topik pada bab ini adalah penjabaran topik yang akan dijabarkan dapat menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Border Wall Project Turki berdasarkan pengaruh faktor domestik dan internasional.

**BAB 3**, berisi analisis pengaruh faktor domestik dan internasional. Pada bab ini akan memaparkan bagaimana faktor domestik dan internasional dapat berpengaruh terhadap perubahan kebijakan luar negeri dan menghasilkan perubahan kebijakan luar negeri berupa Border Wall Project atau pembangunan tembok perbatasan.

**BAB 4**, berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan penjelasan topik yang diteliti atau hasil analisis fenomena dengan teori konsep sebagai pedoman dalam perubahan kebijakan luar negeri.